

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Istilah manajemen merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia dari kata *management*. Kata *management* sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu *manus* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan.³⁰ Jadi, secara harfiah, manajemen berarti melakukan sesuatu dengan tangan. Namun, dalam perkembangannya, manajemen memiliki makna yang lebih luas dan kompleks.

Manajemen dalam konteks Islam dapat diartikan sebagai proses pengaturan, pengelolaan, merencanakan, dan pelaksanaan yang baik.³¹ Istilah yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk manajemen adalah "*yudabbiru*", yang bermakna mengatur atau mengelola dengan baik. Hal ini sesuai dengan definisi yang diungkapkan oleh Ramayulis bahwa bentuk masdar dari kata "*yudabbiru*", yaitu "*at-tadbîr*", memiliki makna yang sama dengan hakikat manajemen, yaitu pengaturan.³²

Selain itu, dalam Surah an-Nisa ayat 82, terdapat ajakan untuk memperhatikan Al-Qur'an, yang dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari proses manajemen dalam Islam. Kata "*yatadabbaruna*" yang digunakan dalam ayat tersebut mengandung makna memperhatikan atau merenungkan. Dalam tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Maraghiy, kata tersebut dijelaskan sebagai perenungan terhadap akibat perkara serta implikasi dan akibatnya.^{33,34} Sementara dalam tafsir Al-Azhar, "*tadabbara*" diartikan sebagai merenungkan Al-Qur'an.

³⁰ Usman, *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, 3.

³¹ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t.), 506.

³² Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Penerbit Kalam Mulia, 2011), 259.

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 639.

³⁴ Ahmad Mushthafa al-Maraghiy, *Tafsir al-Maraghiy, Diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar Lc. Dkk* (Semarang: Tohputra, 1988), 168.

Dari pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa manajemen dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan proses pengaturan dan pengelolaan secara efektif, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan pemikiran yang mendalam, seperti merenungkan ajaran Al-Qur'an untuk mengambil pelajaran dan petunjuk dalam menjalankan urusan dunia dan akhirat. Ini menunjukkan bahwa manajemen dalam konteks Islam mengandung dimensi holistik yang mencakup aspek materiil dan spiritual dalam upaya mengatur dan mengelola segala sesuatu dengan baik.

Dalam literatur manajemen, kita dapat menemukan tiga makna dari manajemen, yakni: Pengertian manajemen adalah salah satu topik yang sering dibahas dalam bidang ilmu administrasi, bisnis, dan organisasi. Manajemen adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang manajer atau sekelompok orang untuk mengelola suatu organisasi atau unit kerja dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Manajemen memiliki tujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Beberapa ahli telah memberikan berbagai pandangan mengenai definisi manajemen:

Menurut Ouabouch dan Lavastre, manajemen dalam konteks ini mencakup proses identifikasi, pemahaman, dan mitigasi kerentanan, risiko, dan pengaruhnya terhadap kinerja persediaan, memastikan bahwa data yang dikelola dan digunakan dapat memberikan pemahaman yang holistik dan berkelanjutan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.³⁵

Menurut Moncef, manajemen dalam konteks ini adalah proses pengumpulan, analisis, dan penggunaan data pelanggan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat hubungan bisnis, meningkatkan komunikasi, dan menyelaraskan kegiatan organisasi dengan harapan pelanggan.³⁶

Menurut Osibanjo, manajemen mengacu pada upaya untuk menggunakan data sebagai alat untuk memahami dan menganalisis hubungan antara dimensi-

³⁵ Lhoussaine Ouabouch dan Olivier Lavastre, "Vulnérabilité, risque et performance en Supply Chain Management Cas de l'industrie agroalimentaire au Maroc," *Logistique & Management* 23, no. 1 (Januari 2015): 71–89, <https://doi.org/10.1080/12507970.2015.11665673>.

³⁶ Btissam Moncef, Christine Belin-Munier, dan Audrey Couteau, "Insatisfaction et Restauration de La Relation Client-Fournisseur Par Un Système de Management de La Performance," *Logistique & Management* 23, no. 3 (Januari 2015): 3–16, <https://doi.org/10.1080/12507970.2015.11742758>.

dimensi tersebut dengan tingkat keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan dapat didefinisikan sebagai tingkat keterikatan, motivasi, dan keterlibatan emosional karyawan terhadap pekerjaan dan organisasi.³⁷

Menurut Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dengan tujuan mencapai hasil yang efektif dan efisien. Hasibuan menekankan bahwa manajemen adalah ilmu karena didasarkan pada teori-teori dan metode-metode yang teruji, serta seni karena membutuhkan kreativitas dan intuisi dalam menghadapi situasi yang berbeda-beda.³⁸

Manajemen didefinisikan oleh R. Terry dalam buku *Principles of Management: Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and other resources*. Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Terry menjelaskan bahwa manajemen adalah sebuah proses yang khas karena memiliki karakteristik-karakteristik tertentu yang membedakannya dari proses-proses lainnya. Terry juga mengidentifikasi empat fungsi utama dari manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan.³⁹

Definisi Terry ini menunjukkan adanya tanggung jawab yang besar bagi seorang pemimpin, yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an. Seperti yang diungkapkan dalam surat Al-Mudatsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.⁴⁰

Sedangkan menurut Stoner manajemen adalah proses perencanaan,

³⁷ Adewale Osibanjo dkk., “Bolstering Human Capital Management and Engagement in the Health Sectors,” ed. oleh Pantea Foroudi, *Cogent Business & Management* 7, no. 1 (1 Januari 2020): 1794676, <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1794676>.

³⁸ Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen* (Alfabeta, 2013), 165–66.

³⁹ George R. Terry, *Principles of Management* (Richard D. Irwin, INC. Homewood, Irwin-Dorsey Limited Georgetown, Ontario L7G 4B3, 1977), 4.

⁴⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Depag RI, 1982), 566.

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner menekankan bahwa manajemen adalah suatu proses yang melibatkan kerjasama antara anggota organisasi dan penggunaan berbagai sumber daya organisasi. Stoner juga mengganti kata “menggerakkan” dengan “pengarahan” untuk menunjukkan bahwa manajer tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga memberikan motivasi dan komunikasi kepada para anggota organisasi.⁴¹

Robbins, menyatakan bahwa manajemen adalah aktivitas yang meliputi perencanaan, pengembangan, pengorganisasian dan pengendalian atas keputusan dan tindakan untuk mencapai tujuan. Robbins menekankan bahwa manajemen adalah sebuah aktivitas yang meliputi perencanaan, pengembangan, pengorganisasian dan pengendalian atas keputusan dan tindakan. Robbins juga mengganti kata “sasaran” dengan “tujuan” untuk menunjukkan bahwa tujuan tersebut bisa bersifat jangka pendek atau jangka panjang.⁴²

Manajemen adalah pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis situasi internal dan eksternal.⁴³ Ini melibatkan alokasi dan optimalisasi sumber daya seperti orang, uang, bahan, informasi, dan teknologi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan organisasi. Manajemen juga mencakup komunikasi, koordinasi, dan hubungan harmonis dengan semua pemangku kepentingan, serta penyelesaian cerdas konflik dan masalah.⁴⁴ Proses manajemen terdiri dari empat aktivitas utama: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Perencanaan menetapkan tujuan dan jalur pencapaian.⁴⁵ Pengorganisasian berfokus pada penataan sumber daya dan struktur organisasi. Penggerakan melibatkan motivasi dan pemantauan pelaksanaan rencana. Pengawasan memastikan hasil sesuai harapan dan menentukan perbaikan jika diperlukan. Dalam setiap aktivitas organisasi, manajemen memainkan peran penting dengan pendekatan berorientasi proses untuk mencapai tujuan organisasi.

⁴¹ Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2* (BPFE-Yogyakarta, 2003), 8.

⁴² Torang, *Organisasi & Manajemen*, 166.

⁴³ Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2* (BPFE-Yogyakarta, 2012), 10.

⁴⁴ Torang, *Organisasi & Manajemen*, 165.

⁴⁵ Handoko, *Manajemen Edisi 2*, 2012, 8.

2. Fungsi-Fungsi Manajemen

Untuk mencapai tujuan, organisasi perlu menjalankan fungsi-fungsi manajemen dengan baik. George R. Terry, seperti yang disebutkan dalam penelitian oleh Kayo 2007, mengidentifikasi fungsi-fungsi manajemen sebagai perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan (POAC).⁴⁶

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah inti dari segala aktivitas yang akan dijalankan. Dalam perspektif manajemen, perencanaan adalah pengambilan keputusan yang kritis.⁴⁷ Penataan dalam administrasi merupakan pusat pergerakan segala jenis kemampuan yang menjadi alasan untuk mencapai tujuan hierarkis. Hal ini mencakup pengambilan keputusan dasar yang menggabungkan berbagai bagian organisasi untuk mencapai kecukupan kerangka kerja secara keseluruhan. Perencanaan bukan hanya tindakan biasa, tetapi juga mencakup penilaian, pemilihan opsi, dan perencanaan langkah-langkah penting untuk mencapai tujuan. Dalam sistem pengaturan, seluruh asosiasi harus dilibatkan, dan pengaturan yang kuat akan mencapai tujuan dengan efektif, mengarahkan asosiasi ke arah pencapaian visi dan misi yang telah diungkapkan.

Proses perencanaan melibatkan serangkaian langkah yang krusial. Langkah-langkah utama dalam proses perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan permasalahan yang perlu diatasi.
2. Mengumpulkan informasi yang andal dan relevan tentang aktivitas yang terkait.
3. Menganalisis dan mengklasifikasikan informasi yang diperoleh.
4. Menetapkan dasar pendapat perencanaan dan mengidentifikasi batasan yang perlu diperhatikan.
5. Menentukan rencana alternatif yang mungkin.

⁴⁶ Kahatib Pahlawan Kayo, *Manajemen Dakwah* (Amzah, 2007), 32.

⁴⁷ Husaini Usman, *Manajemen* (Bumi Aksara, 2013), 77.

6. Memilih rencana yang paling sesuai dari alternatif yang diusulkan.
7. Membuat urutan kronologis yang rinci mengenai pelaksanaan rencana yang terpilih.
8. Melakukan pengendalian untuk mengawasi kemajuan pelaksanaan rencana yang telah dipilih.

Langkah-langkah ini membantu organisasi dalam merencanakan tindakan dengan cermat dan efisien serta memastikan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah tahap penting dalam administrasi yang mencakup latihan pengumpulan, penyampaian tugas, dan perencanaan untuk mencapai tujuan hierarki. Ini termasuk menentukan struktur otoritas, tugas, kemampuan, posisi dan hubungan antar unit dalam asosiasi.⁴⁸ Koordinasi menjamin pemanfaatan aset manusia dan material secara efektif dalam mencapai tujuan. Dalam siklus ini, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab individu dikelola untuk menjamin kegiatan yang efisien, koordinasi yang baik dan pencapaian tujuan otoritatif yang ideal.⁴⁹

c. Penggerakan (*Actuating*)

Actuating berasal dari kata kerja "*to actuate*," yang artinya adalah "mendorong untuk bertindak; menggerakkan, memotivasi, mempengaruhi." Oleh karena itu, *actuating* berkaitan dengan upaya untuk mempengaruhi orang-orang sehingga mereka termotivasi dan merasa termotivasi untuk melaksanakan berbagai usaha demi mencapai tujuan tertentu.⁵⁰ *Actuating* adalah tahap dalam manajemen di mana manajer berperan dalam memotivasi, memimpin, dan memengaruhi anggota tim untuk bertindak sesuai dengan rencana dan tujuan

⁴⁸ Torang, *Organisasi & Manajemen*, 170.

⁴⁹ Torang, 170.

⁵⁰ Winardi, *Dasar-Dasar Ilmu Manajemen* (Alumni, 1979), 90.

organisasi. Ini penting untuk mencapai hasil yang diinginkan.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan (*Controlling*) adalah tahap penting dalam manajemen yang melibatkan identifikasi dan penerapan metode serta alat untuk memastikan pelaksanaan rencana sesuai dengan yang telah direncanakan.⁵¹ Ini adalah proses penilaian, evaluasi, dan jika perlu, tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan memperbaiki proses yang mungkin telah menyimpang dari rencana, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dan perbaikan dapat dilakukan jika diperlukan. Dalam prakteknya, pengawasan melibatkan pemeriksaan oleh atasan, pencocokan dengan rencana yang telah ditetapkan, dan upaya memastikan bahwa aktivitas yang berlangsung sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁵² Pengawasan adalah alat penting untuk memantau kinerja organisasi, mencegah penyimpangan, dan mencapai hasil sesuai rencana.

B. Forum Dai Dan Ustadz Muda (FODIUM)

Dakwah dan pengembangan umat Islam merupakan bidang yang sangat penting dan strategis, terutama di era globalisasi dan demokrasi seperti saat ini. Umat Islam dituntut untuk tidak hanya menjaga identitas dan aqidahnya, tetapi juga berkontribusi secara positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Untuk itu, dibutuhkan para dai dan ustadz muda yang memiliki kompetensi, integritas, dan dedikasi tinggi dalam menyampaikan dan mengamalkan ajaran Islam. Menyadari hal tersebut, sekelompok dai dan ustadz muda di Sumatera Utara berinisiatif untuk membentuk sebuah organisasi yang bernama Forum Dai dan Ustadz Muda (FODIUM). Organisasi ini merupakan wadah bagi para dai dan ustadz muda untuk bersilaturahmi, berdiskusi, berkolaborasi, dan bersinergi dalam berbagai kegiatan dakwah dan pengembangan umat Islam.⁵³

⁵¹ Handoko, *Manajemen Edisi 2*, 2012, 25.

⁵² M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Ghalia Indonesia, 1983), 24.

⁵³ Hanirwan dan Muniruddin, "Strategi Pengembangan Kader Dai Melalui Program Forum

Organisasi FODIUM Sumatera Utara didirikan pada tanggal 17 Maret 2018, dengan deklarasi yang dilakukan di Masjid Nurul Islam Jl.M Nawi Harahap Kota Medan. Deklarasi ini dihadiri oleh ratusan dai dan ustadz muda dari berbagai daerah di Sumatera Utara, serta beberapa tokoh masyarakat, ulama, pemerintah, dan media. Dalam deklarasi tersebut, organisasi FODIUM Sumatera Utara menyatakan visi, misi, tujuan, dan programnya, serta memilih pengurusnya. Sedangkan untuk FODIUM Deli Serdang diresmikan pada tanggal 30 Agustus 2023, ketua umum oleh Bapak Habib Syamsuddin merupakan seorang dai yang aktif dan berpengalaman dalam berbagai kegiatan dakwah.⁵⁴

Organisasi FODIUM memiliki dua tujuan utama, yaitu mempererat silaturahmi dan meningkatkan dakwah. Pertama, organisasi ini ingin menjalin hubungan yang baik antara para dai dan ustadz muda, agar dapat saling berbagi ilmu, pengalaman, dan informasi. Dengan begitu, organisasi ini berharap dapat menciptakan suasana yang harmonis dan saling mendukung di kalangan para dai dan ustadz muda. Kedua, organisasi ini ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas dakwah Islam di masyarakat, khususnya dalam menghadapi pemilu tahun 2024. Organisasi ini berusaha untuk menyampaikan pesan-pesan Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, serta relevan dengan perkembangan zaman. Dengan begitu, organisasi ini berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi umat Islam dan bangsa Indonesia.⁵⁵

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, organisasi FODIUM Sumatera Utara melaksanakan berbagai program dan kegiatan, baik di tingkat pusat maupun cabang. Organisasi ini memiliki cabang di Sumatera Utara, yaitu Medan, Deli Serdang, Karo, Tebing Tinggi, Batu Bara, Tanjung Balai, Labuhanbatu, dan Labuhanbatu Utara. Setiap cabang memiliki struktur organisasi, pengurus, dan anggota yang sama dengan pusat, namun dengan skala yang lebih kecil.

C. Partisipasi Politik

Dai & Ustadz Muda (FODIUM) Sumatera Utara.”

⁵⁴ sumutprov.go.id, “Fodium Deliserdang Dilantik, Ijeck Harap Da’i dan Ustadz Muda Berdakwah ke Pelosok Daerah,” diakses 18 Juli 2024, <https://artikel/artikel/fodium-deliserdang-dilantik-ijeck-harap-da-i-dan-ustaz-muda-berdakwah-ke-pelosok-daerah>.

⁵⁵ Hanirwan dan Muniruddin, “Strategi Pengembangan Kader Dai Melalui Program Forum Dai & Ustadz Muda (FODIUM) Sumatera Utara.”

1. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi dan modernisasi politik. Ini mencerminkan hak warga negara untuk turut serta dalam pengambilan keputusan politik yang memengaruhi kehidupan mereka.⁵⁶ Partisipasi politik melibatkan tindakan individu atau kelompok untuk memengaruhi pembuatan keputusan pemerintah yang membentuk arah negara dan masyarakat.

Menurut Andersson, Partisipasi Politik adalah keterlibatan aktif dan kritis warga negara, khususnya kaum muda, dalam proses pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Partisipasi politik tidak hanya meliputi kegiatan formal seperti memilih, menjadi anggota partai, atau menghubungi pejabat pemerintah, tetapi juga kegiatan informal seperti berdiskusi, berdemonstrasi, atau berkreasi secara online. Partisipasi politik memerlukan kerangka analisis yang dapat memahami konteks, motivasi, strategi, dan dampak dari berbagai bentuk keterlibatan politik kaum muda. Kerangka analisis ini harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti identitas, kepentingan, nilai, pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dimiliki oleh kaum muda, serta pengaturan pedagogis publik dan situasi yang memfasilitasi atau menghambat partisipasi politik mereka. Dengan demikian, partisipasi politik merupakan proses pembelajaran sosial yang dinamis, interaktif, dan transformasional, yang dapat mengubah pandangan, perilaku, dan hubungan kaum muda dengan pemerintah, masyarakat, dan diri mereka sendiri.⁵⁷

Menurut De Leon dan Daus Partisipasi politik adalah proses di mana warga negara, khususnya orang , mengekspresikan kepentingan, aspirasi, dan pandangan mereka dalam ranah publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui berbagai cara dan saluran. Partisipasi politik tidak hanya terbatas pada kegiatan pemilihan, tetapi juga mencakup kegiatan seperti berkontribusi pada kampanye politik, bergabung dengan organisasi masyarakat, berpartisipasi dalam diskusi publik, atau menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi atau pendapat. Partisipasi politik dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun

⁵⁶ Cholisin dan others, *Dasar Dasar Ilmu Politik* (Yogyakarta: UNY Press, 2007), 151.

⁵⁷ Erik Andersson, "The Pedagogical Political Participation Model (the 3P-M) for Exploring, Explaining and Affecting Young People's Political Participation," *Journal of Youth Studies* 20, no. 10 (26 November 2017): 1346–61, <https://doi.org/10.1080/13676261.2017.1333583>.

eksternal, yang berkaitan dengan identitas, nilai, sikap, motivasi, dan sumber daya dari orang . Partisipasi politik juga dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan ekonomi yang menentukan peluang, tantangan, dan hambatan bagi keterlibatan orang. Partisipasi politik adalah tanda penting dari integrasi politik individu, yang mencerminkan sejauh mana mereka merasa terlibat dalam sistem politik, memiliki pengaruh terhadap keputusan publik, serta menerima pengakuan dan perlindungan dari negara.⁵⁸

Menurut Calenda dan Meijer Partisipasi politik adalah proses di mana warga negara, khususnya kaum muda, menggunakan Internet sebagai sarana untuk mengakses, menyebarkan, dan mempengaruhi informasi, opini, dan keputusan politik yang relevan dengan kepentingan dan nilai-nilai mereka. Partisipasi politik melalui Internet tidak menggantikan, tetapi melengkapi, partisipasi politik melalui saluran konvensional seperti pemilihan, organisasi, atau demonstrasi. Partisipasi politik melalui Internet memungkinkan kaum muda untuk berinteraksi dengan aktor politik tradisional seperti partai, kandidat, atau media, serta dengan sesama warga negara yang memiliki minat atau pandangan yang sama atau berbeda. Partisipasi politik melalui Internet juga memungkinkan kaum muda untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan identitas politik mereka, serta untuk belajar dan berkontribusi pada isu-isu politik yang baru atau alternatif.⁵⁹

Miriam Budiarjo, seperti yang dikutip oleh Cholisin (2007), mendefinisikan partisipasi politik sebagai keterlibatan aktif dalam kehidupan politik, termasuk dalam pemilihan pemimpin negara dan pengaruh terhadap kebijakan publik. Ini mencakup berbagai aktivitas, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai politik atau kelompok kepentingan, berkomunikasi dengan pejabat pemerintah, dan tindakan serupa yang memengaruhi arah kebijakan dan proses politik.⁶⁰

Partisipasi politik memiliki peran penting dalam sistem demokrasi, dan

⁵⁸ Erwin S. De Leon dan Gem P. Daus, "Filipino American Political Participation," *Politics, Groups, and Identities* 6, no. 3 (3 Juli 2018): 435–52, <https://doi.org/10.1080/21565503.2018.1494013>.

⁵⁹ Davide Calenda dan Albert Meijer, "YOUNG PEOPLE, THE INTERNET AND POLITICAL PARTICIPATION: Findings of a Web Survey in Italy, Spain and The Netherlands," *Information, Communication & Society* 12, no. 6 (September 2009): 879–98, <https://doi.org/10.1080/13691180802158508>.

⁶⁰ *Ibid*, 150.

tingkat partisipasi yang tinggi menandakan keterlibatan aktif warga negara dalam masalah politik.⁶¹ Hal ini mencerminkan minat mereka dalam urusan kenegaraan. Di sisi lain, tingkat partisipasi yang rendah dapat mengindikasikan kurangnya perhatian warga negara terhadap urusan politik. Tingkat partisipasi yang tinggi mendukung stabilitas dan keberlanjutan negara dalam konteks demokrasi.⁶²

Dalam Tafsir Al-Azhar, Hamka mengartikan politik sebagai bidang yang tidak terpisahkan dari agama, di mana keduanya saling menyempurnakan. Ia menekankan konsep syura yang fleksibel dan situasional namun tetap berlandaskan moral agama. Menurut Hamka, kesejahteraan negara tercipta ketika pemimpin dan rakyat mengamalkan akhlak al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan internasional, Hamka menegaskan bahwa Islam membolehkan kerjasama dengan non-Muslim selama mereka tidak memerangi atau mengusir umat Islam dari tanah air mereka. Hamka juga menyoroti pentingnya konsistensi moral dalam perilaku politik, mengajak umat untuk memahami bahwa politik bisa menjadi mulia jika dijalankan dengan prinsip-prinsip agama.⁶³

Beberapa ahli telah memberikan definisi yang berbeda tentang partisipasi politik:

- Deliar Noer

Menurut Deliar Noer (1983), politik adalah ... segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.⁶⁴

- Ibnu Taimiyah dalam karyanya *Siyasah Syar'iyah*

Mengemukakan bahwa politik dalam Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah, dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan masyarakat melalui kepemimpinan yang baik. Menurutnya, pemimpin yang

⁶¹ Ibid.

⁶² Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 369.

⁶³ NIM 03531292 Sartiman Setiawan, "Penafsiran Hamka Tentang Politik Dalam Tafsir Al-Azhar" (skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2009), 1, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1822/>.

⁶⁴ Deliar Noer, *Pengantar ke pemikiran politik* (Rajawali, 1983), 6.

rusak akan membawa dampak buruk bagi rakyat, sehingga penting untuk memiliki pemimpin yang adil, akuntabel, dan mampu mempromosikan persaudaraan, pluralisme, persamaan, permusyawaratan, dan perdamaian. Negara yang ideal, menurut Ibnu Taimiyah, adalah negara yang menerapkan prinsip-prinsip politik ini untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan seluruh masyarakat.⁶⁵

- Keith Fauls

Menurut Keith Fauls (1999), dukungan politik merujuk pada keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup penentangan terhadap pemerintah dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.⁶⁶

- Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences*

Herbert McClosky (1972) menggambarkan kerjasama politik sebagai aktivitas sukarela dari warga yang melibatkan mereka dalam pemilihan pejabat pemerintah dan dalam pembuatan kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶⁷

- Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam "No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries"

Menurut Huntington dan Nelson (1997), partisipasi politik adalah tindakan warga negara yang berperan sebagai individu-individu dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, damai atau bermuatan kekerasan, legal atau ilegal, serta bisa efektif atau tidak efektif.⁶⁸

2. Faktor-faktor Partisipasi Politik

Tingkat partisipasi politik seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dua variabel utama yang memengaruhi partisipasi politik adalah kesadaran politik

⁶⁵ NIM 09 234 531 Dedi Syaputra, "ETIKA POLITIK (Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Kitab al-Siyâsah al-Syar'îyyah Fî Ishlâh al-Râ'î Wa al-Ra'îyyah)" (masters, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), 1, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6894/>.

⁶⁶ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta Indonesia: Kencana PrenadaMedia, 2010), 133, <http://repo.unand.ac.id/10083/>.

⁶⁷ Herbert McClosky, *International Encyclopaedia of the Social Sciences*, ed. oleh Herbert Damsar, *International Encyclopaedia of the Social Sciences* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 252.

⁶⁸ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (Jakarta: Rineka Cipta, 1944), 3.

terhadap pemerintah (sistem politik) dan penilaian terhadap kebijakan pemerintah. Kesadaran politik mencakup pemahaman akan hak dan kewajiban warga negara serta penilaian terhadap kinerja pemerintah dan kebijakan yang diterapkan. Bagaimana seseorang menilai tindakan pemerintah dan sejauh mana ia merasa kebijakan tersebut mencerminkan kepentingannya dapat memotivasi atau menghambat partisipasi politik individu.⁶⁹

Selain faktor-faktor tersebut, posisi sosial dan status ekonomi juga berperan penting dalam memengaruhi tingkat partisipasi politik. Posisi sosial seseorang ditentukan oleh sejumlah faktor, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan keturunan. Pengetahuan politik, minat dalam politik, perhatian terhadap politik, dan kepercayaan terhadap pemerintah dipengaruhi oleh status sosial. Pengetahuan politik dan minat cenderung lebih tinggi di kalangan mereka yang memiliki status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi. Berdasarkan kekayaan yang dimiliki seseorang, mereka dapat mengetahui posisi mereka di masyarakat. Status ekonomi juga dapat mempengaruhi partisipasi politik, karena individu dengan status ekonomi yang lebih tinggi mungkin lebih cenderung untuk terlibat dalam kegiatan politik. Oleh karena itu, tingkat partisipasi politik seseorang dipengaruhi oleh status sosial dan ekonomi mereka.⁷⁰

Menurut Myron Weimer, partisipasi politik dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti yang dikutip oleh Mohtar Mas' oed dan Collin MacAndrews (2011).⁷¹

Faktor-faktor ini mencakup:

- 1) Modernisasi: Modernisasi dalam berbagai bidang seperti pertanian dan industri, urbanisasi, peningkatan tingkat melek huruf, perbaikan pendidikan, dan perkembangan media massa memiliki dampak pada partisipasi politik. Perkembangan ini memberikan akses yang lebih besar pada warga negara untuk terlibat dalam proses politik.
- 2) Perubahan Struktur Kelas Sosial: Terbentuknya kelas menengah dan

⁶⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 140.

⁷⁰ A. Ramlan Surbakti, "Pranata Politik" dalam J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, "Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan, 2006, 144-145, <https://scholar.google.com/scholar?cluster=2494800299287764578&hl=en&oi=scholar>.

⁷¹ Mas' oed Mohtar dan MacAndrews Colin, *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), 56-57.

perluasan kelas pekerja akibat era industrialisasi dan modernisasi dapat mengubah struktur kelas sosial. Tingkat partisipasi politik akan terpengaruh selama hal ini berlangsung.

- 3) Pengaruh Kaum Intelektual dan Media Massa Modern: Tuntutan untuk berpartisipasi dalam proses politik dapat dipicu oleh pengenalan gagasan-gagasan baru seperti liberalisme dan nasionalisme oleh para intelektual dan penyebarannya melalui media massa kontemporer.
- 4) Konflik di Antara Pemimpin Politik: Persaingan antara pemimpin politik untuk memenangkan kekuasaan seringkali melibatkan upaya mereka untuk mendapatkan dukungan massa. Ini dapat mendorong partisipasi politik masyarakat.
- 5) Keterlibatan Luas Pemerintah dalam Unsur Ekonomi, Sosial, dan Budaya: Semakin luasnya peran pemerintah dalam sektor ekonomi, sosial, dan budaya seringkali mendorong organisasi dan kelompok masyarakat untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.

Dengan demikian, faktor-faktor ini dapat memengaruhi dan memotivasi partisipasi politik masyarakat dalam berbagai konteks sosial dan politik.

Menurut Milbrath, sebagaimana dikutip oleh Michael Rush dan Althoff (1989), terdapat berbagai alasan yang mempengaruhi keterlibatan seseorang dalam aktivitas politik, termasuk:⁷²

- 1) Penerimaan Perangsang Politik: Milbrath mengatakan bahwa kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak pribadi, keanggotaan dalam organisasi, dan melalui media massa dapat memengaruhi partisipasi politik. Individu yang lebih terbuka terhadap informasi politik cenderung lebih aktif dalam kegiatan politik.
- 2) Karakteristik Sosial Seseorang: Faktor-faktor sosial seperti status ekonomi, etnisitas, usia, jenis kelamin, dan keyakinan agama dapat memengaruhi partisipasi politik. Karakteristik individu ini memiliki dampak signifikan pada partisipasi politik mereka.

⁷² Michael Rush dan Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: PT. Rajawali, 1989), 168.

- 3) Sistem Partai dan Lingkungan Sosial: Lingkungan sosial dan sistem partai politik negara tempat individu tinggal memainkan peran penting dalam partisipasi politik. Dalam negara demokratis, partai politik cenderung mencari dukungan massa dan mempromosikan partisipasi politik. Hal ini dapat mendorong partisipasi politik warga.
- 4) Perbedaan Regional: Perbedaan regional dalam budaya dan lingkungan juga dapat memengaruhi perilaku politik dan partisipasi politik individu. Lingkungan geografis dan perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara individu terlibat dalam kegiatan politik.

Dengan demikian, partisipasi politik seseorang dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang mencakup sensitivitas mereka terhadap isu-isu politik, karakteristik sosial, sistem politik di negara mereka, dan faktor lingkungan regional.

3. Tipologi Partisipasi Politik

Menurut A. Rahman H.I (2007), tipologi partisipasi politik umumnya dapat dibedakan menjadi tiga kategori utama:⁷³

- 1) Partisipasi aktif, ini adalah bentuk partisipasi yang berfokus pada kedua proses *input* (masukan) dan *output* (keluaran) dalam kehidupan politik. Individu yang terlibat dalam partisipasi aktif biasanya berperan dalam pemilihan, memberikan masukan kebijakan, dan aktif dalam berbagai aspek politik.
- 2) Partisipasi pasif, dalam bentuk ini, individu lebih cenderung hanya mengikuti tindakan pemerintah tanpa banyak berperan dalam proses politik. Mereka cenderung tunduk pada peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, serta menaati aturan tanpa memberikan kontribusi yang signifikan.
- 3) Golput (golongan putih) atau kelompok apatis, ini mencakup individu yang merasa sistem politik yang ada tidak sesuai dengan harapan mereka dan cenderung apatis terhadap proses politik. Mereka mungkin tidak berpartisipasi dalam pemilihan atau kegiatan politik lainnya karena merasa kecewa atau merasa bahwa sistem tidak mencerminkan aspirasi mereka.

Menurut Milbrath dan Goel, seperti yang dikutip oleh Cholisin (2007),

⁷³ A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 288.

partisipasi politik dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagai berikut.⁷⁴

- 1) Partisipasi politik apatis: Mengacu pada individu yang tidak aktif dan cenderung menarik diri dari proses politik. Mereka tidak terlibat dalam kegiatan politik dan kurang tertarik untuk berpartisipasi.
- 2) Partisipasi politik spectator: Merujuk pada individu yang kadang-kadang ikut serta dalam pemilihan umum atau proses politik lainnya, tetapi lebih sebagai pengamat yang tidak terlibat secara aktif dalam proses politik.
- 3) Partisipasi politik gladiator: Melibatkan individu yang aktif terlibat dalam proses politik. Mereka bisa menjadi komunikator, spesialis kontak tatap muka, aktivis partai politik, atau pekerja kampanye yang aktif dalam berbagai kegiatan politik di masyarakat.
- 4) Partisipasi politik pengkritik: Merujuk pada individu yang berpartisipasi dalam bentuk-bentuk yang tidak konvensional seperti protes jalanan, gerakan sosial, atau tindakan politik alternatif lainnya. Mereka berusaha menyampaikan pesan atau kritik mereka melalui tindakan langsung atau bentuk partisipasi politik yang tidak biasa.

4. Bentuk Partisipasi Politik

Tingkat kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah (sistem politik), seperti yang ditentukan oleh Paige dalam Cholisin (2007), dapat menghasilkan empat jenis partisipasi politik yang berbeda. Pertama, partisipasi aktif mencakup kegiatan aktif dalam proses politik, seperti pemilihan umum, berpartisipasi dalam kampanye, atau berorganisasi politik. Kedua, partisipasi pasif tertekan atau apatis adalah ketidakpedulian atau ketidaktertarikan dalam urusan politik. Ketiga, partisipasi militan radikal melibatkan tindakan politik yang ekstrem, seperti protes keras atau demonstrasi yang memerlukan pengorbanan. Terakhir, partisipasi pasif mencakup tindakan sederhana seperti mematuhi peraturan pemerintah tanpa terlibat dalam kegiatan politik yang lebih aktif.⁷⁵

Partisipasi politik, sebagaimana dijelaskan oleh Almond sebagaimana

⁷⁴ Cholisin dan others, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, 152.

⁷⁵ Cholisin dan others, 153.

dikutip oleh Mohtar Mas'ood (2011), dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik nonkonvensional.⁷⁶

Berikut adalah rincian bentuk partisipasi politik dalam kedua kategori tersebut:

- 1) Partisipasi politik konvensional mencakup:
 - a) Pemberian suara atau voting dalam pemilihan
 - b) Diskusi politik
 - c) Kegiatan kampanye politik
 - d) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
 - e) Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif
- 2) Partisipasi politik nonkonvensional melibatkan:
 - a) Pengajuan petisi
 - b) Berdemonstrasi
 - c) Konfrontasi
 - d) Mogok atau pemogokan
 - e) Tindakan kekerasan politik terhadap harta benda seperti pengrusakan, pemboman, atau pembakaran
 - f) Tindakan kekerasan politik terhadap manusia seperti penculikan, pembunuhan, perang gerilya, atau revolusi.

1. Perilaku Memilih

Perilaku memilih merujuk pada serangkaian tindakan yang melibatkan pembuatan keputusan, termasuk pilihan untuk memberikan suara atau tidak dalam pemilu.⁷⁷ Definisi serupa diungkapkan oleh Prihatmoko (2008), yang menggambarkan perilaku memilih sebagai partisipasi warga negara dalam pemilihan umum sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan politik. Ini mencakup berbagai tindakan yang berkaitan dengan partisipasi dalam pemilihan, dan ini mencerminkan keterlibatan warga dalam politik demokratis.⁷⁸

2. Perilaku Politik

⁷⁶ Mohtar dan Colin, *Perbandingan Sistem Politik*, 57–58.

⁷⁷ Cholisin Cholisin, "Konsolidasi demokrasi melalui pengembangan karakter kewarganegaraan," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2004): 124, <http://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/5670>.

⁷⁸ Joko J.prihatmoko, *Menang Pemilu Di Tengah Oligarki Partai* (Makassar: Pustaka Pelajar, 2008), 46.

Perilaku politik meliputi aktivitas yang terkait dengan proses pengambilan keputusan dan dinamika dalam ruang publik. Para ahli, termasuk Ramlan Surbakti dan Sudijono Sastroadmodjo, sepakat bahwa perilaku politik juga mencakup tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam upaya untuk mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan kekuasaan.⁷⁹

D. Definisi Umat

Kata "umat" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki dua makna utama. Pertama, "umat" diartikan sebagai penganut atau pemeluk suatu agama; pengikut Nabi. Dalam konteks ini, tidak mengherankan jika kita sering mendengar ungkapan seperti "komunitas agama," "komunitas Kristen," "komunitas Muslim," dan sebagainya. Ungkapan ini menunjukkan bahwa "umat" digunakan untuk merujuk pada kelompok individu yang berbagi keyakinan agama yang sama dan mengikuti ajaran yang sama.⁸⁰

Kedua, "umat" diartikan sebagai manusia, dimana "umat" digunakan untuk menggambarkan sekelompok atau kumpulan orang. Dalam konteks ini, istilah "umat" dapat merujuk pada semua manusia sebagai satu kesatuan yang terdiri dari berbagai kelompok dan komunitas.⁸¹

1. Tafsiran Syaikh Mustafa al-Maraghi tentang Umat

Syaikh Mustafa al-Maraghi, seorang ulama terkenal, memberikan tafsiran yang lebih mendalam tentang kata "umat". Menurut beliau, kata "umat" memiliki lima makna yang berbeda:⁸²

- a. *Millah* (agama): Dalam konteks ini, "umat" merujuk pada pengikut suatu agama tertentu. Misalnya, umat Islam, umat Kristen, dan sebagainya. Kata "*millah*" menunjukkan bahwa "umat" adalah kumpulan individu yang terikat oleh keyakinan dan praktik keagamaan yang sama.
- b. *Al-jama'ah* (kelompok): "Umat" juga dapat diartikan sebagai kelompok atau komunitas. *Al-jama'ah* menunjukkan adanya ikatan sosial dan organisasi yang menghubungkan individu-individu dalam kelompok tersebut.

⁷⁹ Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 131.

⁸⁰ Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Nasional, 2008), 1586.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, 3 ed., vol. 1 (Cairo: Dar al-Fikr, t.t.), 121.

- c. *Az-zaman* (waktu): Dalam tafsiran ini, "umat" merujuk pada periode atau zaman tertentu. Misalnya, umat pada zaman Nabi Muhammad SAW atau umat pada zaman tertentu dalam sejarah.
- d. *Al-imam* (pemimpin): "Umat" juga dapat merujuk pada pengikut seorang pemimpin atau imam. Dalam konteks ini, umat adalah kumpulan individu yang dipimpin oleh seorang tokoh yang menjadi panutan dan teladan.
- e. *Al-umam al-ma'rufah* (komunitas terkenal): Kata "umat" juga bisa merujuk pada komunitas terkenal seperti Yahudi dan Kristen. Istilah ini menunjukkan bahwa umat adalah kelompok yang dikenal dalam sejarah dan memiliki identitas yang kuat.

2. Pendapat M. Quraish Shihab tentang Umat

M. Quraish Shihab, seorang cendekiawan Muslim terkemuka, berpendapat bahwa kata "umat" berasal dari kata Arab (*amma-yaummu*) yang berarti menuju, bergantung pada, dan meneladani. Dari akar kata yang sama, muncul kata "*um*" yang berarti "ibu" dan "*imam*" yang berarti "pemimpin". Kedua kata ini menunjukkan bahwa ibu dan pemimpin adalah sosok yang menjadi teladan, tumpuan, dan harapan bagi umat.⁸³

Pendapat ini menekankan bahwa umat adalah kumpulan individu yang memiliki tujuan bersama, bergantung satu sama lain, dan menjadikan pemimpin serta nilai-nilai tertentu sebagai teladan. Umat dalam pengertian ini adalah sebuah komunitas yang terikat oleh nilai-nilai moral dan etika yang sama, serta memiliki tujuan dan aspirasi yang serupa.

3. Definisi Umat menurut Ar-Raghib al-Asfahani

Menurut ar-Raghib al-Asfahani, "umat" merujuk pada setiap kelompok yang disatukan oleh sesuatu, baik itu agama, waktu, atau tempat, baik secara sukarela maupun tidak.⁸⁴ Definisi ini menunjukkan bahwa umat adalah entitas sosial yang terbentuk karena adanya faktor pengikat tertentu, baik yang bersifat sukarela maupun yang terjadi karena keadaan.

Dalam konteks keimanan, ar-Raghib al-Asfahani memberikan

⁸³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, 19 ed. (Bandung: PT Mizan Pustaka, t.t.), 325.

⁸⁴ Ar-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat fii al-Fadl al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), 33.

pengertian bahwa umat adalah kelompok yang memilih pengetahuan dan amal saleh sehingga mereka menjadi *uswah* (contoh) bagi yang lainnya. Pengertian ini menekankan aspek moral dan spiritual dari konsep umat, dimana anggota umat berusaha untuk mencapai pengetahuan dan melakukan perbuatan baik, sehingga mereka menjadi teladan bagi orang lain.

Dari berbagai definisi dan tafsiran yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kata "umat" memiliki makna yang kaya dan beragam. Dalam KBBI, kata ini memiliki dua makna utama, yaitu sebagai penganut agama dan sebagai kumpulan manusia. Tafsiran Syaikh Mustafa al-Maraghi menambah kedalaman pemahaman dengan lima makna tambahan, yaitu agama, kelompok, waktu, pemimpin, dan komunitas terkenal.

Pendapat M. Quraish Shihab memberikan perspektif bahwa umat adalah kumpulan individu yang bergantung satu sama lain dan menjadikan pemimpin serta nilai-nilai tertentu sebagai teladan. Sedangkan definisi ar-Raghib al-Asfahani menekankan bahwa umat adalah kelompok yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu dan berusaha untuk menjadi contoh dalam pengetahuan dan perbuatan baik.

Dengan demikian, konsep "umat" tidak hanya merujuk pada aspek religius semata, tetapi juga mencakup dimensi sosial, moral, dan spiritual yang luas. Umat adalah sebuah komunitas yang memiliki identitas, tujuan, dan nilai-nilai yang sama, serta berusaha untuk menjadi teladan bagi anggota lainnya dan masyarakat secara umum.

E. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sebuah proses yang diadakan untuk memilih perwakilan rakyat dan pemimpin daerah, serta membentuk pemerintahan yang kuat dan demokratis, yang harus didukung oleh dukungan rakyat guna mencapai tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut O'Leary, Pemilihan umum adalah proses demokratis di mana warga negara, khususnya di Negara, memilih perwakilan mereka di parlemen dan pemerintahan berdasarkan program, visi, dan kinerja partai dan kandidat politik.

Pemilihan umum dapat menyebabkan perubahan besar dalam konstelasi politik dan kebijakan publik, tergantung pada dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang ada. Pemilihan umum melibatkan partisipasi politik yang tinggi dan beragam dari berbagai kelompok dan individu, baik melalui pemungutan suara, kampanye, debat, atau media. Pemilihan umum juga merupakan mekanisme akuntabilitas dan legitimasi bagi pemerintah yang terpilih, yang harus memenuhi harapan dan kebutuhan rakyat, serta menghadapi tantangan dan krisis yang mungkin timbul.⁸⁵

Pemilihan umum adalah proses demokratis di mana warga negara memilih perwakilan mereka di pemerintahan berdasarkan strategi, isu, dan kinerja partai dan kandidat politik. Pemilihan umum dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti media, iklan, survei, debat, dana, dan kondisi sosial-ekonomi. Pemilihan umum dapat menimbulkan persaingan sengit dan ketidakpastian antara partai-partai politik, terutama jika perbedaan suara sangat tipis. Pemilihan umum juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang menarik perhatian atau kontroversial, yang dapat membalikkan kecenderungan pemilih. Pemilihan umum merupakan salah satu cara bagi warga negara untuk mengekspresikan hak dan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari demokrasi.⁸⁶

Menurut Baines dan Harris Pemilihan umum adalah proses di mana warga negara memilih perwakilan mereka di pemerintahan berdasarkan citra politik. Pemilihan umum dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti media, iklan, survei, debat, dana, dan kondisi sosial-ekonomi. Pemilihan umum melibatkan strategi pemasaran politik yang kompleks dan dinamis, yang mencakup branding politik, iklan serangan, pengalaman saluran, konsumsi dan penciptaan bersama, Eropaisasi, dan segmentasi pemilih. Pemilihan umum juga melibatkan pertimbangan etis, sosial, dan nirlaba, yang berkaitan dengan dampak dan akuntabilitas pemilihan umum terhadap masyarakat dan lingkungan. Pemilihan umum juga melibatkan hubungan antara lobi dan pemasaran politik, yang berkaitan dengan pengaruh dan kepentingan kelompok-kelompok tertentu dalam proses

⁸⁵ Eimear O’Leary, “General Election (Republic of Ireland) 2011,” *Irish Political Studies* 27, no. 2 (Juni 2012): 326–40, <https://doi.org/10.1080/07907184.2012.675170>.

⁸⁶ Christopher A.D. Charles dan Gleasia S.O. Reid, “Forecasting the 2016 General Election in Jamaica,” *Commonwealth & Comparative Politics* 54, no. 4 (Oktober 2016): 449–77, <https://doi.org/10.1080/14662043.2016.1216729>.

politik.⁸⁷

Menurut Haris, pemilihan umum adalah salah satu cara untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pemahaman dan kesadaran politik masyarakat mengenai demokrasi akan meningkat meningkatkan apabila proses ini melibatkan banyak orang, dilakukan secara langsung dan transparan.⁸⁸ Menurut Pasal 1 ayat (1) dari UU No. 11 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, pemilu didefinisikan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip langsung, universal, bebas, rahasia, adil, dan jujur di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini adalah mekanisme penting dalam proses demokrasi di Indonesia.⁸⁹

Menurut Huntington sebagaimana dijelaskan oleh Rizkiyansyah, sebuah negara dapat dikategorikan sebagai demokratis jika memiliki mekanisme pemilihan umum yang teratur atau periodik. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk menciptakan sirkulasi elit dalam sistem pemerintahan.⁹⁰ Dalam konteks ini, pemilihan umum menjadi sebuah instrumen penting untuk menjaga proses demokrasi dan memastikan partisipasi warga negara dalam pemilihan pemimpin mereka secara teratur. Menurut Dani (2006), pemilihan umum adalah instrumen demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk membentuk struktur kekuasaan negara berdasarkan aspirasi mereka. Dengan demikian, proses pemilu lahir dari kehendak rakyat dan berperan dalam menegakkan kekuasaan negara yang mewakili keinginan rakyat. Hasilnya adalah pemerintahan yang sesuai dengan kehendak dan kebutuhan rakyat, dan kekuasaan tersebut menjadi otoritas yang sah dan berwibawa karena akarannya dalam dukungan rakyat.⁹¹

Menurut Rahman (2002), pemilu adalah mekanisme dan alat yang

⁸⁷ Paul Baines dan Phil Harris, "Marketing in the 2010 British General Election: Perspectives, Prospect, and Practice," *Journal of Marketing Management* 27, no. 7-8 (Juli 2011): 647-55, <https://doi.org/10.1080/0267257X.2011.591916>.

⁸⁸ Haris, *Politik organisasi: perspektif mikro diagnosa psikologis*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 10.

⁸⁹ "Undang - undang Nomor 11 Tahun 2011 mengenai penyelenggaraan pemilihan umum.," t.t.

⁹⁰ Ferry Kurnia Rizkiyansyah, *Mengawal pemilu menatap demokrasi: catatan penyelenggaraan Pemilu 2004* (Bandung: Idea Pub., 2007), 3.

⁹¹ Karim Dani, *Sistem Politik dan Pemilu di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), 11.

memungkinkan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat, yang memiliki peran penting dalam menjalankan kedaulatan rakyat.⁹² Oleh karena itu, berbagai sistem pemilihan umum telah berkembang sesuai dengan kebutuhan. Di sisi lain, Rizkiyansyah (2007) mengungkapkan bahwa pemilihan umum merupakan salah satu elemen yang sangat mewakili praktik demokrasi, dan demokrasi itu sendiri tidak dapat ada tanpa adanya pemilihan umum.⁹³

Kunci dalam mewujudkan demokrasi diperankan oleh berlangsungnya pemilihan umum sebagaimana yang telah ditegaskan pada penjelasan di atas. Pemilihan umum merupakan alat penting yang harus digunakan dengan hati-hati untuk memastikan keberlangsungan demokrasi tanpa merusaknya atau menimbulkan penderitaan bagi rakyat. Keberhasilan pemilihan umum harus selalu didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama negara. Dengan demikian, pemilihan umum menjadi instrumen vital untuk memastikan tegaknya demokrasi dan nilai-nilai dasar negara.

2. Asas dan Sistem Pemilihan Umum

Asas "Luber," yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia," adalah dasar dari pemilihan umum di Indonesia. Pedoman ini pertama kali diterapkan pada masa Orde Baru. Namun, seiring berjalannya era reformasi, muncul juga asas "Jurdil," yang singkatan dari "Jujur dan Adil." Kedua asas, "Luber dan Jurdil," memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemilu. Dalam UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, asas "Luber dan Jurdil" diatur secara rinci, menekankan pentingnya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁹⁴ Asas pemilihan umum merupakan prinsip-prinsip penting dalam sistem pemilu yang mencakup:

- a. Langsung: Hak suara diberikan langsung oleh rakyat pilih tanpa perantara, memungkinkan mereka untuk menyatakan pilihannya sesuai dengan kehendak hati nurani.

⁹² Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia : dalam perspektif, struktural, fungsional* (Surabaya: Sic, 2002), 194.

⁹³ Rizkiyansyah, *Mengawal pemilu menatap demokrasi*, 3.

⁹⁴ "Undang - undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang Diundangkan.," t.t.

- b. Umum: Hak memilih terbuka untuk semua warga negara (WN) yang telah mencapai usia 17 tahun atau telah menikah, dan hak dipilih diberikan kepada WN yang telah mencapai usia 21 tahun, tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian.
- c. Bebas: Rakyat pemilih memiliki kebebasan penuh untuk memilih sesuai dengan hati nurani mereka tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapa pun atau dengan cara apapun.
- d. Rahasia: Sistem pemilu menjamin bahwa pilihan suara rakyat pemilih tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan melalui metode apapun, menjaga kerahasiaan pilihan mereka (prinsip "*secret ballot*").
- e. Jujur: Kejujuran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selalu diharapkan pada semua tahapan proses pemilu, termasuk oleh penyelenggara, pemerintah, partai politik peserta pemilu, pengawas, pemantau pemilu, dan pemilih.
- f. Adil: Dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu harus diperlakukan secara adil, bebas dari kecurangan, dan dengan perlakuan yang sama tanpa ada keberpihakan dari pihak manapun.

Prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam menjalankan sistem pemilu yang transparan dan demokratis. Asas yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum mencakup beragam prinsip yang membentuk dasar pemilihan umum yang baik, efisien, dan efektif.⁹⁵ Pasal 2 UU tersebut mencantumkan berbagai asas, termasuk:

- a. Mandiri: Pemilu harus diselenggarakan secara independen, tanpa pengaruh atau intervensi dari pihak eksternal.
- b. Jujur: Seluruh tahapan pemilu harus dijalankan dengan integritas dan ketulusan, tanpa adanya kecurangan atau tindakan yang tidak jujur.
- c. Adil: Pemilu harus memberikan perlakuan yang setara kepada semua peserta pemilu dan pemilih, tanpa adanya keberpihakan.
- d. Kepastian Hukum: Seluruh proses pemilu harus berdasarkan hukum yang jelas dan pasti, memberikan keyakinan bahwa pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁹⁵ "Undang - undang Nomor 11 Tahun 2011 mengenai penyelenggaraan pemilihan umum."

- e. Tertib Penyelenggara Pemilu: Pemilu harus dijalankan dengan tata tertib yang ketat untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik dan tertib.
- f. Keterbukaan: Seluruh tahapan pemilu, termasuk proses pemilihan dan penghitungan suara, harus terbuka untuk pengawasan publik dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- g. Proporsionalitas: Sistem pemilu harus mempertimbangkan proporsi perwakilan berdasarkan aturan yang berlaku.
- h. Profesionalitas: Penyelenggara pemilu harus memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka.
- i. Akuntabilitas: Semua pihak yang terlibat dalam pemilu, termasuk penyelenggara, harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka.
- j. Efisiensi: Pemilu harus dijalankan secara efisien, memanfaatkan sumber daya dengan baik untuk mencapai hasil yang maksimal.
- k. Efektivitas: Pemilu harus mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif, yaitu pemilihan wakil rakyat dan pemerintahan yang sesuai dengan kehendak rakyat.

Asas-asas ini menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola yang baik. Seperti yang diindikasikan oleh Rahman, kerangka konstituen biasanya diatur oleh regulasi dan terdiri dari tiga variabel penting yang membentuk sistem dasar untuk mengkoordinasikan pemilihan. Ketiga ini adalah:⁹⁶

- a. Penyuaaran (*Balloting*): Penyuaaran mengacu pada sistem yang harus diikuti oleh warga yang memenuhi syarat untuk memberikan suara mereka..
- b. Daerah Pemilihan Umum (*Electoral District*): Daerah pemilihan umum adalah ketentuan yang mengatur berapa jumlah kursi wakil rakyat yang akan diisi oleh masing-masing daerah pemilihan.
- c. Formula Pemilihan: Formula pemilihan adalah rumus atau metode yang digunakan untuk menentukan siapa atau partai politik mana yang akan memenangkan kursi di suatu daerah pemilihan.

Ketiga variabel ini menjadi bagian integral dalam perancangan dan implementasi sistem pemilihan umum di suatu negara, dan mereka sangat

⁹⁶ Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, 177.

memengaruhi cara pemilu dijalankan dan hasilnya. Konstitusi Indonesia, yang terdapat dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, mengatur tentang pemilihan umum dengan tujuan untuk menjamin hak warga Indonesia untuk memilih pemimpin dan wakil yang mereka pilih. Pasal 22E tersebut menegaskan bahwa pemilihan umum harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan periode pemilihan setiap lima tahun sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Undang-undang ini mengatur prosedur pelaksanaan pemilu dan prinsip-prinsip dasar yang harus dijalankan dalam pemilihan umum di Indonesia.

Darmastuti dan Maryanah (2004) menjelaskan beberapa prinsip krusial dalam pemilihan umum yang harus dipastikan, yaitu:⁹⁷

- a. Keadilan: Prinsip ini adalah dasar penting untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki hak yang sama dalam proses pemilihan umum.
- b. Kejujuran: Kejujuran diperlukan bukan hanya dalam pelaksanaan pemilu untuk memastikan hasil pemilihan umum sah, tetapi juga harus dijunjung tinggi oleh semua peserta pemilu dan pemilih.
- c. Umum: Menjamin bahwa semua warga negara memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum tanpa memandang status sosial, etnis, agama, atau pandangan politik tercermin dalam prinsip ini.
- d. Bebas: Kebebasan pemilih untuk menyatakan pilihan politiknya adalah aspek penting dalam pemilihan umum.
- e. Kerahasiaan: Prinsip kerahasiaan memastikan bahwa pilihan pemilih tidak diketahui oleh pihak lain.
- f. Langsung: Prinsip ini menekankan bahwa setiap warga negara harus secara langsung memilih pilihan politiknya tanpa perantara.

Prinsip-prinsip ini adalah landasan penting dalam menjamin pemilihan umum yang adil, transparan, dan demokratis. Indonesia telah menggelar pemilihan umum sejumlah kali sebagai manifestasi demokrasi rakyat Indonesia. Ini telah terjadi selama berbagai periode, termasuk masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa

⁹⁷ Ari Darmastuti dan Tabah Maryanah, "Peningkatan Kesadaran Perempuan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Wilayah Pesisir di Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung" (Bandar Lampung, Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Lampung, 2004), 48.

Reformasi.⁹⁸ Dalam studi ilmu politik, beragam sistem pemilihan umum telah diidentifikasi, meskipun sebagian besar dapat dikelompokkan ke dalam dua prinsip utama: sistem distrik (*constituency* dengan satu anggota) dan sistem proporsional atau perwakilan berimbang (*constituency* dengan banyak anggota).⁹⁹

F. Penelitian Terdahulu yang relevan

Berdasarkan hasil pencarian, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul skripsi ini, yaitu:

1. **Pengaruh Partisipasi Politik Umat Islam Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kota Bandar Lampung.** Penelitian ini merupakan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fauzan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik umat Islam berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Kota Bandar Lampung. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi partisipasi politik umat Islam, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah di Kota Bandar Lampung.
2. **Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Umat Islam di Indonesia.** Penelitian ini merupakan tesis yang ditulis oleh Asep Abdurrohman sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Politik di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan politik berpengaruh positif terhadap partisipasi politik umat Islam di Indonesia, baik secara kognitif, afektif, maupun konatif. Hal ini berarti bahwa pendidikan politik dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku politik umat Islam di Indonesia.
3. **Strategi Peningkatan Partisipasi Politik Umat Islam Melalui Pendidikan Politik.** Penelitian ini merupakan skripsi yang ditulis oleh Mochammad Nurul

⁹⁸ Syafiie, *Ilmu Pemerintahan* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 136.

⁹⁹ J. Kristiadi, *Konsep, Strategi dan Kriteria Keberhasilan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance (di Lingkungan Pemerintahan)* (Jakarta: CSICI, 2008), 461.

Huda sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Darussalam Aceh pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan partisipasi politik umat Islam melalui pendidikan politik adalah dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

4. **Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilu 2024.** Artikel ini merupakan artikel ilmiah yang ditulis oleh Rizal Ramli sebagai salah satu hasil penelitian yang dipublikasikan di ResearchGate pada tahun 2021. Artikel ini membahas tentang pentingnya meningkatkan partisipasi politik pemilu 2024, khususnya bagi umat Islam. Artikel ini mengusulkan beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik pemilu 2024, antara lain: memperbaiki sistem pemilu, memperkuat peran ormas Islam, membangun kesadaran politik, dan memilih pemimpin yang berkualitas. Artikel ini juga memberikan beberapa rekomendasi bagi pemerintah, partai politik, ormas Islam, media massa, dan masyarakat umum dalam rangka meningkatkan partisipasi politik pemilu 2024
5. **Partisipasi Politik Umat Islam dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019: Studi Kasus di Provinsi Aceh.** Artikel ini merupakan artikel ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Nasir Ibrahim sebagai salah satu hasil penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Analisis Ilmu Administrasi (JAI) pada tahun 2020. Artikel ini mengkaji tentang partisipasi politik umat Islam dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019, khususnya di Provinsi Aceh. Artikel ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survei. Data artikel ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Data artikel ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan bantuan program SPSS versi 23.0. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa partisipasi politik umat Islam dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 di Provinsi Aceh adalah tinggi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini berarti bahwa umat Islam di Provinsi Aceh memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.

G. Kerangka pikir

Bagan 2.1. Kerangka Pikir

